

## Between Integrity and Digital Crime: An Analysis of Judges' Considerations in the Case of Electronic Document Forgery for the Selection of Candidates for State Civil Apparatus

### Antara Integritas Dan Kejahatan Digital: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Elektronik Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara

Benny Karya Limantara<sup>1</sup>, Andriyanto<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Postgraduate Program in Master of Law, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

 : andriyanto.andri99@gmail.com

Corresponding Author\*



#### Abstract

**Introduction:** In every joint of modern life, documents play a vital role as a means of evidence, identification, legitimacy, and a means of transaction. In the midst of an increasingly rapid wave of digital transformation, the modus operandi of document forgery has evolved.

**Purposes of the Research:** Analyzing the criminal law regulations against the falsification of electronic documents in the selection of State Civil Apparatus Candidates (CASN), with a case study of Decision Number 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

**Methods of the Research:** Using a normative-empirical approach, primary data from interviews with investigators from the Lampung Regional Police, the prosecutor of the Bandar Lampung District Attorney's Office, and the Judge of the Tanjung Karang District Court were combined with secondary data from a literature study of laws and regulations, court decisions, and criminal law literature.

**Results Main Findings of the Research:** The panel of judges in its decision proved the defendant's guilt through five valid evidence (witness statements, experts, letters, instructions, defendant's statements) that were correlated with each other, fulfilling Article 183 of the Criminal Code. Judicial independence is reflected in the penalty of 1 year and 6 months plus an IDR fine. 30 million, lighter than the prosecutor's demand for 4 years who balanced legal firmness with proportionality. The value of integrity is realized through the recognition of violations that maintain the meritocracy of the State Civil Apparatus Candidate, while substantive justice arises from the moderation of sanctions that take into account the context of the case and the character of the defendant. The research recommends improving people's digital literacy, cyber forensic competence of law enforcement officials, and a holistic approach of judges in handling electronic evidence. This study contributes to the discourse of criminal law in the digital era and strengthening bureaucratic integrity.

**Keywords:** Forgery of Electronic Documents; Selection of Candidates for State Civil Apparatus; Judge's Considerations.

#### Abstrak

**Latar Belakang:** Setiap sendi kehidupan modern, dokumen memegang peranan vital sebagai alat bukti, identifikasi, legitimasi, dan sarana transaksi. Di tengah gelombang transformasi digital yang kian pesat, modus operandi pemalsuan dokumen pun berevolusi.

**Tujuan Penelitian:** Menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pemalsuan dokumen elektronik dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dengan studi kasus Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

**Metode Penelitian:** Menggunakan pendekatan normatif-empiris, data primer dari wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Lampung, jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dikombinasikan dengan data sekunder dari studi pustaka peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum pidana.

**Hasil Temuan Penelitian:** Majelis hakim dalam putusnya membuktikan kesalahan terdakwa melalui lima alat bukti sah (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) yang saling berkorelasi, memenuhi Pasal 183 KUHAP. Independensi judicial tercermin dari pidana 1 tahun 6 bulan plus denda IDR. 30 juta, lebih ringan dari tuntutan jaksa 4 tahun yang menyeimbangkan ketegasan hukum dengan proporsionalitas. Nilai integritas terwujud melalui pengakuan pelanggaran yang menjaga meritokrasi Calon Aparatur Sipil Negara, sementara keadilan substantif muncul dari moderasi sanksi yang mempertimbangkan konteks perkara dan karakter terdakwa. Penelitian merekomendasikan peningkatan literasi digital masyarakat, kompetensi forensik siber aparat penegak hukum, serta pendekatan holistik hakim dalam menangani bukti elektronik. Kajian ini berkontribusi pada diskursus hukum pidana era digital dan penguatan integritas birokrasi.

**Kata Kunci:** Pemalsuan Dokumen Elektronik; Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara; Pertimbangan Hakim.

Submitted: 2026-01-25

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: Benny Karya Limantara, Andriyanto. "Between Integrity and Digital Crime: An Analysis of Judges' Considerations in the Case of Electronic Document Forgery for the Selection of Candidates for State Civil Apparatus." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 1 (2026): 162-175. <https://doi.org/10.47268/pamali.v6i1.3739>

Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum, meletakkan hukum sebagai dasar pemerintahan yang menjamin perlindungan bagi rakyatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Kaidah hukum yang jelas mengikat setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam kerangka ini, menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi. Salah satu fondasi sosial yang paling penting adalah hukum, yang mengatur apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan orang.<sup>2</sup>

Sistem hukum Indonesia, yang menggabungkan tiga tradisi utama: hukum Islam, hukum adat lokal, dan hukum Eropa kontinental, mengakar pada ideologi Pancasila. Kombinasi ini memastikan bahwa sistem hukum berjalan secara kontekstual dan proporsional. Menurut Amanat Pembukaan UUD 1945, pemerintah diwajibkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; komitmen ini diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas kesejahteraan fisik dan spiritual.<sup>3</sup>

Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi telah menciptakan kebutuhan mendesak terhadap infrastruktur jaringan yang lebih canggih. Bidang komputasi dan teknologi secara keseluruhan telah merevolusi cara hidup masyarakat serta membentuk ulang peradaban manusia di skala dunia.<sup>4</sup> Kemajuan dalam teknologi informasi telah menghilangkan batasan-batasan geografis, memicu transformasi sosial yang mendalam dalam pola interaksi manusia. Bahkan, gelombang perubahan ini tidak bisa dielakkan dan telah meresapi berbagai dimensi kehidupan sosial. Salah satu

<sup>1</sup> Hartono, B., Limantara, B. K., & Alfaruki, I. "The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk)". *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 8 (2025) h. 4226.

<sup>2</sup> Bambang Hartono, Intan N. S., Suta Ramadan, Benny K. Limantara. *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2024), h. 9.

<sup>3</sup> Benny Karya Limantara, & Purnama, L. I. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor: 1043/PID. B/PN. TJK). *Journal of Law, Education and Business* 3, no. 1 (2025): 712-722.

<sup>4</sup> Jaja Ahmad Jayus. "Pembangunan Hukum dan Keadilan Harus Sesuai di Era Revolusi Industri 4.0" saat menyampaikan keynote speech dalam "The 2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoLGaS)", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2020.